

Analisis Pengaruh Penugasan BPKP terhadap Perolehan Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015

Analysis to Effects of BPKP Assignment to Audit Opinion of Governmental Financial Statement of Districts/Cities in Indonesia Year 2015

Faiz Ridho Darmawan dan Muthmainah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
pro.darmawan@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to prove whether governmental internal auditor, Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), affects positively toward audit opinion conducted by Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). This research is conducted to test the effect of supervisory assignments done by BPKP toward the audit opinion of the year 2015. The supervisory assignments of BPKP in this research is limited to: financial management assistency, workshop and sosialisasi, and SIMDA software implementation. This research takes all districts and cities of Indonesia in 2015 as population. Sample frame taken by purposive sampling methods, resulting in 337 samples to be tested. Secondary datas used in this research are gathered from BPKP and BPK-RI. The datas then tested using statistical data processing software, IBM SPSS Statistic Ver. 22. The result of the research is those three major assignments of BPKP affect audit opinion simultaneously but workshop and socialization did not give significant effect partially. The assignment with positive effect is financial management assistency, while SIMDA implementation has negative effect.

Keyword: *financial management assistency, workshop and socialization, simda implementation, bpkp, audit opinion.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber dayanya baik yang bersumber dari potensi keuangan masing-masing daerah maupun perimbangan pemerintah pusat untuk memenuhi alokasi yang dibutuhkan dalam belanja daerah. Sebagai akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah mengatur bahwa pemerintah daerah (pemda) wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk menilai kewajaran LKPD tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 23E ayat (1) menjalankan audit atas LKPD yang hasilnya adalah opini atas LKPD. Opini atas LKPD sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 diurutkan dari terbaik hingga terburuk adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

BPK menjamin bahwa opini WTP adalah kualitas tertinggi pengelolaan keuangan yang berarti informasi keuangan yang disajikan telah wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (antaranews, 2017). Lebih lanjut BPK menekankan pentingnya menjaga opini WTP bagi pemda yang telah meraihnya. Sebagai *reward* atas pencapaian opini WTP tersebut, pemerintah pusat memberikan tambahan dana insentif daerah (DID)

dengan alokasi minimum dua milyar rupiah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2012).

Adanya *reward* tambahan DID serta stigma yang positif atas tata kelola keuangan yang baik tersebut, wajar jika opini WTP menjadi idaman bagi pengelola keuangan daerah (Gunarwanto, 2017). Beberapa faktor dapat berpengaruh dalam perolehan opini WTP. Teri dan Darmawan (2017) menyimpulkan bahwa dukungan SDM yang paham akuntansi dan mendapatkan sosialisasi yang memadai di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku penyusun laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap perolehan WTP. Selain faktor tersebut, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran auditor internal secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Yuliani, Nadirsyah, dan Bakar, 2010).

Salah satu kunci penting dalam meraih opini WTP adalah peran aparat pengawasan internal pemerintah, dimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan dalam meminimalisir salah saji keuangan (Mulyani dan Suryawati, 2011). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai APIP bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekaligus melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. BPKP juga menjalankan amanat sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membantu perwujudan pelaksanaan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan belanja negara/ daerah secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Mewujudkan hal tersebut, perwakilan BPKP di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ditugaskan menyelenggarakan fungsi di antaranya: memberikan asistensi keuangan daerah; sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan SPIP; dan membantu pengolahan data dan informasi untuk penyelenggaraan keuangan daerah. Siregar dan Setyaningrum (2015) menjelaskan bahwa asistensi dilakukan pada kegiatan tertentu untuk membantu pemda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, sedangkan sosialisasi dan bimtek merupakan kegiatan konsultasi yang dilaksanakan BPKP di pemda untuk memberikan pemahaman terkait regulasi pelaksanaan keuangan bagi pemerintah daerah. Daria dan Elim (2015) menjelaskan bahwa implementasi SIMDA merupakan pengimplementasian sistem perangkat lunak untuk membantu pengelolaan keuangan daerah. Melalui peran BPKP tersebut diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang berdampak pada opini WTP yang diperoleh pemda, karena hasil audit BPK merupakan cerminan tata kelola keuangan pemerintah (Handayani, 2012).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruh asistensi, sosialisasi dan bimtek, dan implementasi SIMDA oleh BPKP terhadap opini audit oleh BPK-RI antara lain Suseno (2010), Siregar dan Setyaningrum (2015), Langelo, Saerang dan Alexander (2015), Alfian (2015), dan Risqianto (2015). Suseno (2010) menyatakan bahwa pengawasan pre-emptif dan preventif BPKP melalui beberapa kegiatan seperti sosialisasi, asistensi, pengembangan dan penyusunan sistem berpengaruh positif terhadap opini audit. Langelo, dkk (2015) menyatakan bahwa pengimplementasian SIMDA yang teruji serta kecukupan sosialisasi dan bimtek berpengaruh positif terhadap opini audit. Alfian (2015) menyimpulkan bahwa implementasi SIMDA berpengaruh positif terhadap opini audit.

Siregar dan Setyaningrum (2015) menyimpulkan bahwa asistensi, sosialisasi dan bimtek oleh BPKP tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Hampir sejalan dengan penelitian tersebut, Risqianto (2015) juga menyimpulkan bahwa sosialisasi dan bimtek serta implementasi SIMDA oleh BPKP tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit, bahkan asistensi oleh BPKP berpengaruh negatif terhadap opini audit. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan perbedaan hasil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk memberikan penilaian efektifitas penugasan BPKP terhadap kesesuaian misi yang ingin dicapai yakni mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka penelitian ini dilakukan. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah variabel independen serta data dan *tools software* yang digunakan. Pengambilan sampel dilakukan pada kabupaten dan kota dengan rentang tahun yang digunakan adalah 2015.

LANDASAN TEORI

Teori keagenan sebagaimana dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan antara pihak pemberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) dalam suatu bentuk kontrak kerja yang telah disepakati. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa hubungan antara pemerintah daerah sebagai eksekutif dengan masyarakat adalah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif. Delegasi wewenang dari legislatif kepada eksekutif ini kemudian oleh Halim dan Abdullah (2006) dikategorikan sebagai sebuah hubungan keagenan. Prinsipal/ DPRD ingin mengetahui informasi tentang aktivitas pemerintah sebagai agen dalam mengelola keuangan, program dan kebijakan publik, sehingga dibutuhkan pihak ketiga yang independen untuk memeriksa kewajaran dan reliabilitas informasi yang disajikan, yakni BPK-RI (Ulum, AS. 2005). BPK-RI sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas keuangan negara/ daerah menjalankan tugasnya dengan menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hasil dari pemeriksaan atas keuangan tersebut adalah opini audit, dimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat jenis opini atas kewajaran laporan keuangan dengan urutan peringkat sebagai berikut: (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti informasi keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti informasi keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. (3) Opini Tidak Wajar (TW) yang berarti informasi keuangan yang disajikan tidak wajar secara material. (4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini/ Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yang berarti auditor tidak dapat mengumpulkan bukti untuk membuat simpulan disebabkan pembatasan yang luar biasa.

BPKP sebagai auditor internal pemerintah, sesuai Perpres 192 tahun 2014 tentang BPKP, hadir untuk membantu perwujudan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel dimana salah satu indikatornya adalah tercapainya opini WTP. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 mengarahkan penugasan-penugasan utama perwakilan BPKP di daerah yang diharapkan

dapat membantu tercapainya tata kelola keuangan daerah yang baik dan dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) perwakilan BPKP di antaranya asistensi pengelolaan keuangan, sosialisasi dan bimtek, dan implementasi SIMDA.

Pengaruh Asistensi oleh BPKP terhadap Opini Audit oleh BPK-RI

Kegiatan asistensi merupakan kegiatan pendampingan BPKP yang membantu aparatur pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya (Siregar dan Setyaningrum, 2015). Asistensi dilakukan sebagai salah satu fungsi untuk menjalankan tugas BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No. 1 Tahun 2016 yaitu pemberian asistensi laporan keuangan pemda, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pengelolaan keuangan negara/ daerah.

Sebagaimana dinyatakan oleh Siregar dan Setyaningrum (2015) bahwa asistensi tidak berpengaruh terhadap opini audit. Suseno (2010) menyatakan bahwa pengawasan preventif oleh BPKP yang diantaranya melalui kegiatan asistensi, berpengaruh positif terhadap opini audit oleh BPK-RI, namun Risqianto (2016) menyatakan bahwa asistensi oleh BPKP berpengaruh negatif terhadap opini audit oleh BPK-RI. Penelitian ini mengajukan hipotesis asistensi oleh BPKP berpengaruh positif terhadap opini audit oleh BPK-RI. Hal ini dikarenakan asistensi dilakukan untuk menjaga kualitas laporan keuangan baik dari kepatuhan terhadap SAP maupun substansi informasi keuangan yang disajikan.

H_1 : Asistensi oleh BPKP berpengaruh positif terhadap opini audit oleh BPK-RI.

Pengaruh Sosialisasi dan Bimtek oleh BPKP terhadap Opini Audit oleh BPK-RI

Sosialisasi dan bimtek adalah salah satu bentuk pembinaan BPKP pada pemerintah daerah sebagai pembina APIP sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 60 Tahun 2008. Siregar dan Setyaningrum (2015) mendefinisikan sosialisasi sebagai penyampaian materi tentang regulasi berkenaan pengelolaan keuangan dan pengendalian intern, sedangkan bimtek sebagai bimbingan konsultasi oleh BPKP untuk membantu pemda dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Siregar dan Setyaningrum (2015) dan Risqianto (2016) bahwa sosialisasi dan bimtek oleh BPKP tidak berpengaruh terhadap opini audit oleh BPK-RI. Penelitian ini mengajukan hipotesis sosialisasi dan bimtek oleh BPKP berpengaruh positif terhadap opini audit oleh BPK-RI. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi dan bimtek ditujukan agar sumber daya manusia (SDM) yang menyusun LKPD di lingkungan pemda dapat memahami bagaimana menghasilkan LKPD yang berkualitas sebagai salah satu upaya meraih WTP (Teri dan Darmawan, 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_2 : Sosialisasi dan Bimtek oleh BPKP berpengaruh positif terhadap opini audit oleh BPK-RI.

Pengaruh Implementasi SIMDA oleh BPKP terhadap Opini Audit oleh BPK-RI

SIMDA merupakan aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemda dalam pengelolaan keuangan daerahnya, dengan mengintegrasikan proses dari tahap penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya (Darea dan Elim,

2015). Aplikasi SIMDA dikembangkan oleh BPKP dan diberikan pada pemda yang menginginkan bantuan dalam pengelolaan keuangannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Alfian (2015) bahwa implementasi SIMDA oleh BPKP berpengaruh positif terhadap opini audit oleh BPK-RI. Disisi lain Risqianto (2016) menyatakan bahwa implementasi SIMDA oleh BPKP tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit oleh BPK-RI. Penelitian ini mengajukan hipotesis implementasi SIMDA oleh BPKP berpengaruh positif terhadap opini audit BPK-RI. Hal ini dikarenakan implementasi SIMDA dapat menanamkan pengendalian internal *by sistem* dan keunggulan *compliance* dengan peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah (diunggah pada konten situs resmi BPKP).

H₃ : Implementasi SIMDA oleh BPKP berpengaruh positif terhadap opini audit oleh BPK-RI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengaruh asistensi, sosialisasi dan bimtek, dan implementasi SIMDA oleh BPKP berpengaruh terhadap opini audit oleh BPK-RI. Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan periode yang digunakan Tahun 2015. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analitis statistik regresi ordinal yang bertujuan untuk menilai ketergantungan variabel dependen yang bersifat skala/ peringkat dengan beberapa variabel independen. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang dilakukan berdasarkan kriteria yang dibuat oleh peneliti. Kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: Menggunakan LKPD kabupaten/ kota tahun anggaran 2015 yang telah diaudit oleh BPK dan Pemerintah kabupaten/ kota yang mendapatkan asistensi keuangan, sosialisasi dan bimtek, dan implementasi SIMDA oleh BPKP selama tahun 2015.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data opini audit BPK-RI terhadap LKPD selama tahun anggaran 2015 yang menjadi variabel terikat diperoleh dari IHPS tahun 2016. Data peran BPKP yang menjadi variabel bebas diperoleh dari realisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPKP selama tahun anggaran 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian terdiri dari 508 pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia pada tahun 2015. Pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* menghasilkan jumlah akhir sampel penelitian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia tahun 2015	508
2	Pemerintah kabupaten/ kota yang tidak menyerahkan LKPD untuk diperiksa BPK-RI tahun 2015	0
3	Jumlah LKPD kabupaten/ kota yang selesai mendapatkan opini	508
4	Jumlah pemerintah kabupaten/ kota yang tidak menjadi objek penugasan asistensi keuangan, bimtek dan sosialisasi	(56)
5	Jumlah pemerintah kabupaten/ kota yang tidak mengimplementasikan aplikasi SIMDA sampai dengan tahun 2015	(115)
6	Jumlah Sampel Penelitian	337

Sumber: data sekunder diolah

Analisis Data

Penelitian menguji data dengan menggunakan beberapa analisis yaitu *Goodness of Fit* untuk mengetahui kelayakan model, *Fitting information* untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, *Pseudo R Square* untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas secara simultan, dan *Parameter Estimates* untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh secara parsial.

Goodness of Fit

Tabel 2 *Goodness of Fit*

	Chi Square	Sig
Pearson	949,980	0,654
Deviance	486,364	1,000

Sumber: data sekunder diolah.

Hasil uji *Goodness of Fit* digunakan untuk menunjukkan kesesuaian model dengan data. Dari hasil uji diperoleh nilai Pearson sebesar 949,980 dengan signifikansi 0,654 ($>0,05$) dan *Deviance* sebesar 486,364 dengan signifikansi 1 ($>0,05$). Hal ini menunjukkan model telah sesuai dengan data empiris atau model layak digunakan.

Model Fitting Information

Tabel 3 Model *Fitting Information*

Model	-2 Log Likelihood	Chi Square	Sig
Intercept Only	549,126		
Final	486,364	62,762	0,012

Sumber: data sekunder diolah.

Pada *Model Fitting Information* -2log Likelihood menerangkan bahwa tanpa memasukkan variabel independen (*intercept only*) nilainya 544,126. Namun dengan memasukkan variabel independen ke model (*final*) terjadi penurunan nilai menjadi 486,364. Perubahan nilai ini merupakan nilai chi-square yaitu 67,762 dan signifikan pada taraf nyata 5% sebab nilai p value atau sig sebesar $0,012 < 0,05$. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semua variabel bebas secara serentak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Pseudo R-Square

Tabel 4 Pseudo R-Square

Cox and Snell	0,170
Nagelkerke	0,211

Sumber: data sekunder diolah

Tabel *Pseudo R-Square* menunjukkan bahwa seberapa besar variabel bebas atau independent (X1, X2, X3, X4 dan X5) mampu menjelaskan variabel terikat atau dependent (Y1). Nilai ini seperti halnya koefisien determinasi pada regresi. Nilai Cox and Snell sebesar 0,170 (17%) dan Nagelkerke sebesar 0,211 (21,1%). Dapat diartikan bahwa semua variabel bebas dapat memberikan sumbangan secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel terikat yaitu sebesar 21,1%.

Pembahasan Uji Hipotesis Dengan Parameter Estimates

Tabel 5 Hasil Uji Parameter Estimates

		Estimate	Std. Error	Wald	Sig.	
Threshold	[Y1 = 1.00]	-12.562	6746.270	.000	.999	
	[Y1 = 2.00]	-12.280	6746.270	.000	.999	
	[Y1 = 3.00]	-9.241	6746.270	.000	.999	

Location	X4	-2.275E-13	1.018E-12	.050	.823	
	X5	9.855E-13	1.001E-12	.970	.325	
	[X1=1.00]	3.724	2.211	2.838	.092	
	[X1=2.00]	4.832	2.221	4.733	.030	
	[X1=3.00]	4.421	2.213	3.989	.046	
	[X1=4.00]	4.394	2.206	3.967	.046	
	[X1=5.00]	4.138	2.214	3.495	.062	
	[X1=6.00]	4.674	2.236	4.370	.037	
	[X1=7.00]	4.129	2.227	3.439	.064	
	[X1=8.00]	4.391	2.243	3.831	.050	
	[X1=9.00]	4.541	2.281	3.963	.047	
	[X1=10.00]	3.275	2.349	1.943	.163	
	[X1=11.00]	3.933	2.267	3.009	.083	
	[X1=12.00]	22.135	.000	.	.	
	[X1=13.00]	3.196	2.278	1.968	.161	
	[X1=14.00]	4.840	2.485	3.793	.051	
	[X1=16.00]	4.026	2.668	2.278	.131	
	[X1=17.00]	.869	2.574	.114	.736	
	[X1=29.00]	0 ^a	.	.	.	
	[X2=1.00]	-13.800	6746.269	.000	.998	
	[X2=2.00]	-13.744	6746.269	.000	.998	
	[X2=3.00]	-13.527	6746.269	.000	.998	
	[X2=4.00]	-13.528	6746.269	.000	.998	
	[X2=5.00]	-13.421	6746.269	.000	.998	
	[X2=6.00]	-13.506	6746.269	.000	.998	
	[X2=7.00]	-13.568	6746.269	.000	.998	
	[X2=8.00]	-13.090	6746.269	.000	.998	
	[X2=9.00]	-14.154	6746.269	.000	.998	
	[X2=10.00]	-14.112	6746.269	.000	.998	
	[X2=11.00]	-12.730	6746.270	.000	.998	
	[X2=12.00]	-12.674	6746.270	.000	.999	
	[X2=13.00]	4.807	9515.590	.000	1.000	
	[X2=15.00]	-14.370	6746.270	.000	.998	
	[X2=16.00]	5.663	9833.457	.000	1.000	
	[X2=17.00]	3.959	.000	.	.	
	[X2=18.00]	2.594	.000	.	.	
	[X2=25.00]	5.557	.000	.	.	
	[X2=26.00]	6.050	.000	.	.	
	[X2=30.00]	0 ^a	.	.	.	
	[X3=1.00]	-1.219	.586	4.317	.038	
	[X3=2.00]	-.359	.560	.412	.521	
	[X3=3.00]	.230	.621	.137	.711	
	[X3=4.00]	0 ^a	.	.	.	

Sumber: data Sekunder diolah

Pengujian hipotesis dilakukan secara serentak melalui analisis Parameter Estimates sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. Hasil pengujian dengan melihat nilai Wald dan nilai signifikansinya. Variabel X2 (bimsos) dengan nilai sig sebesar 0,998 ($>0,05$), X4 (Pendapatan 2015) sebesar 0,050 dengan sig. 0,823 ($> 0,05$) dan variabel X5 (belanja 2015) sebesar 0,970 dengan sig.0,325 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan faktor X2, X4 dan X5 tidak berpengaruh terhadap Y. namun yang mempengaruhi adalah X1 dan X3 yang nilai p value kategorinya $< 0,05$.

Dengan melihat nilai estimate, maka diketahui bahwa variabel X1 atau asistensi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap perolehan opini audit. Hal tersebut sejalan dengan simpulan Suseno (2010) dan hipotesis yang diajukan dimana melalui asistensi oleh BPKP diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten/ kota dalam memperbaiki penyajian informasi keuangan serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah.

Variabel X2 atau bimtek dan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan opini audit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Siregar dan Setyaningrum (2015) dan Rsiqianto (2016). Hal tersebut disebabkan pemberian bimtek dan sosialisasi tidak memiliki output yang dapat terukur dengan baik selain dari terselenggaranya kegiatan bimtek dan sosialisasi serta jumlah peserta yang mengikuti kegiatan. Dari peserta yang mengikuti kegiatan juga tidak dapat diketahui tingkat pemahaman dari materi yang disosialisasikan serta tindak lanjut dari materi tersebut apakah diaplikasikan atau tidak oleh peserta dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu didapat hasil bahwa variabel X3 atau implementasi SIMDA memiliki pengaruh negatif terhadap perolehan opini audit. Hal tersebut tidak sejalan dengan simpulan yang diperoleh Alfian (2015) dan Risqianto (2016). Penelitian ini juga tidak berhasil membuktikan hipotesis bahwa Simda dapat berpengaruh positif terhadap perolehan opini audit. Hal tersebut disebabkan bahwa implementasi SIMDA masih dipengaruhi hal lain yaitu komitmen kepala daerah untuk mengimplementasikan secara komprehensif serta diperlukan kesinambungan dengan penyedia aplikasi yakni BPKP dalam memperbarui fitur yang ada agar sesuai dengan SAP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian diperoleh hasil, pertama, asistensi pengelolaan keuangan, sosialisasi dan bimtek, dan implementasi SIMDA, bersama dengan APBD, secara serentak berpengaruh signifikan terhadap perolehan audit dengan persentase 21,1%. Kedua, APBD dan penugasan BPKP terkait sosialisasi dan bimtek tidak berpengaruh terhadap opini audit. Sosialisasi dan bimtek tidak memberikan pengaruh signifikan karena dalam kegiatan tersebut sulit dilakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta, serta bagaimana tindak lanjut/ aplikasinya dalam pekerjaan sehari-hari aparatur pemda. Adapun variabel yang berpengaruh signifikan terhadap opini audit adalah penugasan BPKP yang terkait asistensi pengelolaan keuangan dan implementasi SIMDA. Asistensi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap perolehan opini audit, sejalan dengan tujuan BPKP dalam memberikan asistensi adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat meraih opini WTP. Di sisi lain implementasi SIMDA oleh BPKP ternyata berpengaruh negatif, hal tersebut disebabkan implementasi SIMDA tidak menjamin dijalkannya aplikasi SIMDA oleh *stakeholders* dalam hal ini pemda.

Dibutuhkan komitmen kuat dari pemda untuk mengimplementasikan SIMDA secara komprehensif dan *ter-update* dengan baik melalui kerjasama yang sinergis dengan BPKP.

Melalui penelitian ini maka diharapkan manfaat yang diperoleh oleh beberapa pihak antara lain: (1) Bagi manajemen BPKP untuk mengevaluasi kembali efektifitas penugasan yang telah dilakukan termasuk melakukan monitoring dan evaluasi atas penugasan-penugasan yang telah dilakukan apakah telah memberikan dampak perbaikan bagi mitra/ pemda. (2) Bagi pemerintah kabupaten/ kota dapat menjadi pertimbangan untuk bekerjasama dengan BPKP dalam membantu perwujudan tata kelola keuangan yang baik. (3) Bagi akademisi dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu keuangan publik utamanya terkait peran auditor internal pemerintah bagi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yakni menambah rentang tahun yang dianalisis sehingga dapat diketahui perkembangan baik realisasi penugasan maupun perbaikan opini audit yang diperoleh pemerintah kabupaten/ kota. Peneliti juga perlu menambah data primer atau sekunder lain untuk memperkuat hasil analisa dan jika memungkinkan menggunakan metode selain regresi ordinal pada SPSS ver. 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Mohammad. 2015. Faktor pendukung implementasi SIMDA dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18 (12): 113-131
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.
- Darea, D. W. dan I. Elim. 2015. Evaluasi penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi (EMBA)*, 3 (6): 114-122.
- Halim, Abdul dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (1): 53-64.
- Handayani, Desi. 2012. Good governance dan kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 5 (12): 12-16.
- <https://kalteng.antaranews.com/berita/271830/bpk-tekankan-pentingnya-opini-wtp-ini-pen-jelasannya>. Diakses 6 Februari 2018.
- <http://www.bpk.go.id/news/kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-mengalami-peningkatan>, diakses tanggal 6 Februari 2018
- <http://www.bpk.go.id/page/sejarah>, diakses tanggal 15 Januari 2018
- <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>, diakses tanggal 15 Januari 2018
- <http://www.bpkp.go.id/berita/read/17657/0/Bersinergi-Melalui-Aplikasi-SIMDA-Dukung-Capaian-Opini-WTP.bpkp>, diakses tanggal 17 Desember 2017
- <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>, diakses tanggal 17 Desember

2017

- <http://www.bpkp.go.id/konten/419/Akuntabilitas-Pelaporan-Keuangan.bpkp>. Diakses tanggal 21 Januari 2018
- Jensen, M. dan W. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behaviour, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. 3 (10): 305-360.
- Kementerian Keuangan. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Langelo, F.; David PE Saerang; dan S. W. Alexander. 2015. Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi (EMBA)*, 3 (3): 1-8.
- Mulyani, P. Dan R. F. Suryawati. 2011. Analisis peran dan fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/ PP No. 60 Tahun 2008) dalam minimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 2 (9): 102-116.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- _____. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- _____. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. 2014. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Risqianto, Taufik. 2015. *Analisis Pengaruh Bimbingan Teknis dan Sosialisasi, Pendampingan Laporan Keuangan, dan Implementasi SIMDA terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Tidak dipublikasikan.
- Siregar, R. A. A., dan D. Setyaningrum. 2015. Analisis pengaruh peran badan pengawasan keuangan dna pembangunan terhadap opini dan temuan audit. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Medan.
- Suseno, Agung. 2010. Eksistensi BPKP dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Jan-Apr: 15-30.
- Teri dan W. Darmawan. 2017. Pemaknaan proses menuju opini WTP: sebuah etnometodologi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 8 (10): 178-186.
- Ulum, A. S. 2005. Pengaruh orientasi etika terhadap independensi dan kualitas audit auditor BPK-RI. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6 (1): 74-93.
- Yuliani, S; Nadirsyah; dan U. Bakar. 2010. Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemeirntah daerah (studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3 (7): 206-220.